

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan efektifitas produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 DPRD memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan adanya fungsi tersebut, DPRD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Bekerja sama dengan bupati/walikota untuk menyusun peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah bupati/walikota yang diusulkan;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

- d. Merekomendasikan pertimbangan dan/atau pencabutan keputusan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota;
- e. Pemilihan wakil bupati/wakil walikota dalam rangka jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Menawarkan pemikiran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tentang strategi kesepakatan internasional regional;
- g. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama luar negeri pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan pertanggungjawaban bupati/walikota pada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- i. Persetujuan rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang menjadi pemalas di masyarakat dan daerah;
- j. Bekerja untuk memastikan bahwa komitmen regional dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Selain itu, anggota DPRD juga memiliki hak untuk mendapatkan insentif agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Salah satu insentif tersebut adalah gaji/penghasilan. Gaji merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya berposisi sebagai manajer dan dibayarkan secara tetap setiap bulannya (Mulyadi, 2016, p.309).

Dalam mewujudkan penggajian yang baik dan efisien, maka dibutuhkan adanya sistem. Dengan menyampaikan informasi keuangan dan akuntansi kepada

manajemen, sistem informasi akuntansi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing (Alsarayreh et al., 2011). Sistem informasi penggajian pegawai ini dibuat untuk memudahkan petugas dalam mengolah gaji (Syamsul, 2012). Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas sistem penggajian karyawan, yang merupakan pekerjaan vital. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kompensasi kepada karyawan atas kontribusi mereka kepada organisasi/lembaga melalui upah. (Giyarti Arif).

Dalam lingkup DPRD menurut Sekretaris DPRD, Widaryanto, gaji/penghasilan anggota DPRD Kota Pekalongan dibayarkan dalam bentuk uang representasi, tunjangan keluarga, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan beberapa komponen penghasilan lain (wawancara Widarjanto, 2022).

Manfaat dari sistem penggajian yang baik antara lain untuk mempermudah dan mempercepat proses penggajian kepada para anggota DPRD agar kesejahteraan dapat terjamin dan dapat juga meningkatkan kinerja para anggota. Dengan demikian dapat mewujudkan terlaksananya tugas dan fungsi DPRD menjadi lebih optimal.

Pada suatu sistem terkadang mempunyai keterbatasan dan kelemahan, sistem tersebut bisa mengakibatkan kesalahan terkait desas-desus akuntansi dan memberikan banyak sekali kesempatan kepada oknum untuk melakukan sebuah kecurangan. Akibatnya harus dilakukan suatu pengendalian. Pada sistem siklus penggajian, sistem pengendalian internal diharapkan bisa membuat kontribusi positif dalam pengendalian internal terhadap semua kegiatan yang dilakukan

supaya sinkron dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan dalam mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan dan kecurangan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Gerry, 2013).

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan tinjauan siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan serta membandingkannya dengan teori yang didapatkan selama perkuliahan. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis yang berjudul “Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi dalam siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan?
- b. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan?
- c. Bagaimana alur prosedur siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan?
- d. Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan karya tulis ini adalah.

- a. Mengetahui pelaksanaan fungsi-fungsi dalam siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan.
- b. Mengetahui dokumen yang diperlukan dalam siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan.
- c. Mengetahui alur prosedur siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan.
- d. Mengetahui penerapan pengendalian internal dalam siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk membatasi pembahasan dalam karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian pada unsur tunjangan kinerja anggota DPRD Kota Pekalongan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan antara lain:

1) Bagi penulis

Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan sekaligus sebagai sarana pembelajaran melalui karya tulis ini dan mendapatkan pengetahuan baru terkait praktik nyata sistem informasi akuntansi siklus penggajian yang belum didapat atau diketahui selama perkuliahan

2) Bagi DPRD Kota Pekalongan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan tinjauan atas pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus penggajian yang telah berjalan di DPRD dengan teori-teori yang ada.

3) Bagi pembaca

Karya tulis ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi khususnya siklus penggajian.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas informasi mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dalam sistem informasi akuntansi siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan. Kemudian dokumen yang dibutuhkan, alur proses siklus penggajian dari proses awal pendataan sampai dengan pencairan tunjangan, dan pengendalian internal yang akan diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, dan observasi.

Sedangkan data sekunder terdiri atas dasar teori sistem informasi akuntansi siklus penggajian, alur proses siklus penggajian, dokumen, pengendalian internal yang terkait dengan siklus penggajian, serta gambaran umum DPRD mulai dari tugas dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi yang akan diperoleh dari sumber internet dan literatur dengan teknik studi kepustakaan.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis memberikan garis besar tugas akhir ini, yang berisi topik-topik sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika pembuatan karya tulis.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini, penulis memaparkan teori-teori mengenai sistem informasi akuntansi siklus penggajian, fungsi-fungsi, dokumen yang diperlukan, alur proses siklus penggajian, dan pengendalian internal.

Bab III Metode Dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis memaparkan metode pengumpulan data, proses penghimpunan, dan memberikan gambaran tentang DPRD Kota Pekalongan, dimulai dengan tugas, fungsi, visi dan misi, serta struktur organisasi. Bab ini juga akan menjabarkan perbandingan antara teori sistem akuntansi siklus penggajian dengan praktik nyata siklus penggajian anggota DPRD Kota Pekalongan.

Bab IV Kesimpulan

Pada bab ini, penulis memberikan uraian kesimpulan terkait dengan hasil pembahasan pada Bab III. Kesimpulan ini juga menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I.